

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Disonansi Kognitif

Teori Disonansi Kognitif (*Cognitive Dissonance*) dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini mengatakan bahwa manusia pada dasarnya manusia bersifat konsisten dan akan cenderung mengambil sikap-sikap yang tidak bertentangan satu sama lain, serta menghindari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya. Namun demikian, dalam kenyataannya manusia seringkali terpaksa harus melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan sikapnya (Noviyanti,2008). Arti disonansi adalah adanya suatu inkonsistensi dan perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan untuk keluar dari ketidaknyamanan tersebut dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur. Disonansi terjadi apabila terdapat hubungan yang bertolak belakang akibat penyangkalan dari satu elemen kognitif terhadap elemen lain, antara elemen-elemen kognitif dalam diri inividu. Disonansi kognitif mempunyai arti keadaan psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul ketika dalam diri manusia terjadi konflik antara dua kognisi atau konflik antara perilaku dan sikap. Dalam teori ini yang dimaksud dengan unsur kognitif adalah setiap pengetahuan, opini, atau apa yang dipercaya orang mengenai sesuatu obyek, lingkungan, diri sendiri atau perilakunya. Disonansi kognitif dapat terjadi pada unsur-unsur kognitif yang relevan atau yang ada hubungannya satu sama lain (Festinger 1957 dalam Novianti 2007).

Teori ini membantu untuk menjelaskan bagaimana sikap skeptisme auditor jika terjadi disonansi kognitif dalam dirinya ketika mendeteksi kecurangan. Tingkat kepercayaan (*trust*) auditor yang tinggi terhadap klien akan menurunkan tingkat skeptisme profesionalnya, demikian sebaliknya. Sedangkan pemberian penaksiran risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) yang tinggi dari atasan auditor kepada auditor akan meningkatkan skeptisme profesionalnya, demikian sebaliknya (novianti, 2007). Disonansi kognitif terjadi apabila auditor mempunyai *trust* yang tinggi terhadap klien tetapi atasan auditor memberinya penaksiran risiko kecurangan yang tinggi. Teori disonansi kognitif juga membantu untuk menjelaskan apakah skeptisisme profesional auditor terpengaruh atau tidak dengan *fraud risk assessment* (penaksiran risiko kecurangan) yang rendah yang ditetapkan oleh atasannya, padahal auditor sebenarnya mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah terhadap klien.

2.2. Teori Interpretasi Sosial

Teori Interpretasi Sosial dari Alfred Schutz dalam Nilam Halimah (2013) menjelaskan bahwa ketika orang bertindak dalam kehidupan sehari-harinya, mereka membuat tiga asumsi dasar. Pertama, mereka berasumsi bahwa realitas dan struktur kehidupan adalah konstan, yaitu bahwa kehidupan akan tetap tampak seperti semula. Kedua, mereka beranggapan bahwa pengalaman mereka terhadap kehidupan adalah valid. Sehingga, orang menganggap bahwa persepsi mereka terhadap peristiwa adalah akurat. Ketiga, orang melihat dirinya sendiri memiliki kekuatan untuk bertindak dan mencapai sesuatu dan mempengaruhi kehidupan. Untuk melakukan proses auditing yang efektif dan efisien, maka auditor harus memahami bisnis klien, oleh karena itu auditor akan cenderung melakukan

identifikasi terhadap klien (Aldiansyah,2010). Auditor cenderung melakukan interaksi sosial yang intens dalam kurun waktu yang relatif lama agar dapat lebih memahami bagaimana bisnis klien berjalan. Teori ini dapat menjelaskan faktor pengalaman auditor dalam penugasan auditan baik sikap maupun keputusan yang diambil untuk suatu simpulan audit.

2.3. AUDITING

Dalam *The American Accountant Association Committe on Basic Auditing Concepts* (Louwers, 2005:07) mendefenisikan auditing yaitu:

“auditing as a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users”

Defenisi auditing, menurut Mautz & Sharaf dalam Boynton et.al (2006:9) :

“The origin of auditing goes back to times scarcely less remote than of accounting.....Whenever the advance of civilization brought about the necessity of one man being entrusted to some extent with the properlty of another the advisability of some kind of check upon the fidelity of the former would become apparent”

Menurut Arens et.al (2008:04) auditing adalah:

“auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”

Dari definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi yang dapat diukur, mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2.3.1. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus nasional AAIPI dengan surat keputusan nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014, tanggal 24 April 2014.

Standar audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun auditor yang melaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit yang sama ketika auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan standar audit yang bersangkutan.

Menurut standar audit tersebut yang dimaksud dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan audit intern yaitu kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi dengan cara pendekatan sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/inspektorat/unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota serta unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya.

Standar Audit Intern Pemerintah terdiri dari dua bagian utama yaitu;

- a. Standar Atribut (*Attribute Standards*)

Standar atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggungjawab sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern dan standar atribut ini terdiri dari ; Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum

Dalam Standar Umum dijelaskan bahwa auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggungjawab profesionalnya.

b. Standar pelaksanaan (*Performance Standards*)

Standar pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Standar pelaksanaan dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit intern dan Standar Komunikasi Audit Intern.

Auditor wajib mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap material. Suatu hal yang dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan hasil audit intern. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan menurut peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut harus diungkap.

2.4. Skeptisisme Profesional Auditor

Shaub dan Lawrence ,1996 (dalam Suraida,2005) mengartikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut *“professional scepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s behavior...”*.

Skeptisisme profesional digabungkan ke dalam literatur profesional yang membutuhkan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material (Loebbeck, et al, 1984 dalam Suraida,2005). Sikap Skeptisisme Profesional Auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan (SPAP. SA seksi 230).

Skeptisme profesional auditor merupakan sikap (*attitude*) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (Noviyanti, 2007).

American Institute of Certified Public (AICPA) memberi definisi skeptisme profesional adalah :

“ Professional skepticism in auditing implies an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence without being obsessively suspicious or skeptical. The auditors are expected to exercise professional skepticism in conducting the audit, and in gathering evidence sufficient to support or refute management’s assertion “

Sikap skeptisisme profesional auditor diterapkan untuk mendeteksi terjadinya kekeliruan, kecurangan, ataupun penyalahgunaan wewenang yang material dalam organisasi dengan cara menunjukkan sikap skeptisisme profesional

terhadap bukti audit, tidak mudah percaya dengan informasi dan penjelasan dari pernyataan auditee dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada auditee apa alasan atas pernyataannya. Skeptisisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan dan auditor dituntut mempunyai sikap skeptis yang tinggi dengan setiap kemungkinan terjadinya kecurangan, walaupun kecurangan tersebut belum tentu terjadi (Noviyanti, 2007). Skeptisisme profesional auditor akan menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan dapat terjadinya kecurangan (Louwers et al., 2005 dalam Novianti, 2007).

Skeptisme Profesional Auditor menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) Indonesia menjelaskan skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian bukti secara kritis, pengujian bukti secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut. Auditor tidak menanggapi bahwa manajemen tidak jujur, namun juga tidak menanggapi bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisisme profesionalisme, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinan manajemen tidak jujur.

Skeptisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik atau melakukan penghinaan. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut : (1) Apa yang perlu saya ketahui?, (2) Bagaimana caranya saya bisa mendapat informasi tersebut dengan baik?, (3) Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal?. Skeptisme

profesional auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya (Waluyo, 2008).

Waluyo (2008) menyatakan bahwa Auditor menerapkan sikap skeptisisme profesional pada saat mengajukan pertanyaan dan menjalankan prosedur audit, dengan tidak cepat puas dengan bukti audit yang kurang persuasif yang hanya didasarkan pada kepercayaan bahwa manajemen dan pihak terkait selalu memiliki pikiran kritis, profesional, bersikap jujur dan mempunyai sikap percaya diri.

Skeptisme profesional dalam penelitian ini menggunakan definisi yang digunakan dalam Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) Indonesia yang menjelaskan skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian bukti secara kritis, pengujian bukti secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut. Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus nasional AAIPI dengan surat keputusan nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014, tanggal 24 April 2014.

Kee dan Knox's ,1970 (dalam magfirah 2010) dalam model “*Professional Scepticism Auditor*” menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- 1) Faktor-faktor kecondongan etika

Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. *The American Heritage Directory* menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi.

Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Louwers, 1997 dalam Magfirah, 2010), termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesional auditor.

2) Faktor-faktor situasi

Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (situasi *irregularities*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya.

3) Pengalaman

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt, 1988 (dalam Magfirah, 2010) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat *judgement* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Jadi seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Berkaitan dengan skeptisisme ini, penelitian yang dilakukan Kee & Knox's (1970) yang menggambarkan skeptisisme profesional sebagai fungsi dari disposisi etis, pengalaman dan faktor situasional. Michael K. Shaub dan Janice E. Lawrence, 1996 (dalam Magfirah, 2010) mengindikasikan bahwa auditor yang menguasai etika situasi yang kurang lebih terkait dengan etika profesional dan kurang lebih dapat

melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Pengalaman dan Faktor situasional merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan skeptisisme profesional auditor.

2.5. Pengalaman Auditor

Kusumastuti (2008) menyatakan bahwa pengalaman adalah keseluruhan perjalanan yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang di alami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang dihitung berdasarkan suatu waktu atau tahun. Sehingga auditor yang telah lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan berpengalaman. Karena semakin lama bekerja menjadi auditor, maka akan dapat menambah dan memperluas pengetahuan auditor di bidang akuntansi dan dibidang auditing. Sukriah, dkk (2009) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak pengalaman yang dimiliki pekerja tersebut. Indri ,2005 (dalam Yusuf Aulia,2013)) memberikan kesimpulan bahwa seorang yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; 1). Mendeteksi kesalahan, 2). Memahami kesalahan, dan 3). Mencari penyebab munculnya kesalahan.

AICPA AU *section* 100-110 mengkaitkan profesional dan pengalaman dalam kinerja auditor:

“The professional qualifications required of the independend auditor are those of person with the education and experience to practice as such. They do not include those of person trained for qualified to engage in another profession or accupation”.

Menurut Taufik (2008), memperlihatkan bahwa seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa. Maka dengan adanya pengalaman kerja yang semakin lama diharapkan auditor dapat semakin baik dalam pendeteksian kecurangan yang terjadi. Dengan bertambahnya pengalaman auditing, jumlah kecurangan yang diketahui oleh auditor diharapkan akan bertambah. Menurut Herliansyah (2006), mengungkapkan bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman membuat *judgment* lebih baik dalam tugas-tugas profesional ketimbang akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut serta semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjutak, 2005).

Pengalaman akan berpengaruh signifikan ketika tugas yang dilakukan semakin kompleks. Seorang yang memiliki pengetahuan tentang kompleksitas tugas akan lebih ahli dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, sehingga memperkecil tingkat kesalahan, kekeliruan, ketidak beresan, dan pelanggaran dalam melaksanakan tugas (Asih, 2006)

2.6. Independensi

Independensi menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara objektif.

Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawab aktivitas audit intern yang efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung yang tidak terbatas kepada auditor APIP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor. Akuntan Publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Setyaningrum (2010).

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Sawyer (2006) membagi 3 mengenai independensi, yaitu: independensi dalam verifikasi, independensi dalam program audit, dan independensi dalam pelaporan yang dapat diperuntukkan bagi akuntan publik atau auditor eksternal, tetapi konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor internal dalam bersikap objektif. Independensi dalam hal ini adalah independensi dalam pelaporan dimana menurut Sawyer (2006:36) independensi dalam pelaporan menjadikan auditor internal: harus bebas dari perasaan untuk memodifikasi dampak dari fakta-fakta, harus bebas dari hambatan oleh pihak-pihak yang ingin meniadakan auditor dalam memberikan pertimbangan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa independensi mempunyai tiga buah pengertian (Setyaningrum, 2010) yaitu;

- 1) Dalam berbagai hal, independensi berarti kejujuran, integritas, obyektivitas dan tanggung jawab.
- 2) Dalam hal yang lebih sempit, bila dihubungkan dengan pemeriksaan akuntansi sehubungan dengan mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan, maka independensi berarti menghindari berbagai hubungan yang memungkinkan (sekaligus tanpa sadar) merusak obyektif akuntan publik.
- 3) Independensi berarti menghindari hubungan yang dapat menimbulkan kesan seseorang pemeriksa mempunyai suatu konflik kepentingan.

2.7. Kecurangan (*Fraud*)

Beberapa ahli mendefinisikan kecurangan dengan pendapat berbeda-beda

Albrecht (2012) mengemukakan bahwa:

“fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it include surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”

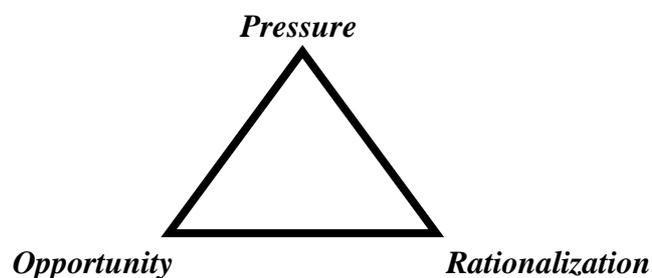
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua sarana dengan berbagai kecerdikan yang dapat dirancang oleh manusia, yang terpaksa dilakukan oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pihak lain oleh pernyataan palsu. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak berubah-ubah yang dapat diletakkan sebagai proporsi umum dalam mendefinisikan penipuan, karena termasuk kejutan, tipuan, licik dan cara-cara yang tidak adil dimana pihak lain ditipu. Batas-batas hanya mendefinisikannya adalah mereka yang membatasi kecurangan manusia.

Pengertian *fraud* menurut *Black's Law Dictionary* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

2.7.1. Faktor-faktor terjadi Kecurangan

Berdasarkan penelitian Cressey ,2006(dalam Martantya et.al, 2013) penyebab atau pemicu *fraud* dibedakan atas tiga hal yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.
Fraud Triangle



1. Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*)

Merupakan motivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Menurut SAS no. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

2. Adanya kesempatan / peluang (*Perceived Opportunity*)

Kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya *internal control* perusahaan yang lemah kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Merupakan elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*), alasan yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) asset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya.

2.7.2. Kecurangan Akuntansi

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Penyimpangan atas Asset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Korupsi sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.7.3. *Fraudulent Financial Reporting*

Amin Widjaja (2011) menjelaskan bahwa *fraudulent financial reporting* adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Definisi *fraudulent financial statement* menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah dikutip oleh Widjaja, (2011) :

..the intentional, deliberate, misstatement, or omission of material facts, or accounting data which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or her judgment or decision.

Penyebab *fraudulent financial reporting* umumnya 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1. Manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan.
2. Salah penyajian (*misrepresentation*) atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan.
3. Salah penerapan (*misapplication*) dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian (*presentation*) dan pengungkapan (*disclosure*).

Gravitt (2006) mengatakan bahwa kecurangan pada laporan keuangan melibatkan skema berikut :

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan yang material, dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Kelalaian yang disengaja atau misrepresentasi peristiwa, transaksi, rekening, atau informasi penting lainnya dari laporan keuangan yang disusun.
3. Kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, pengakuan, laporan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. Kelalaian yang disengaja pada pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berdasarkan prinsip akuntansi dan kebijakan dan nilai keuangan yang terkait.

2.7.4. Kecurangan Manajemen

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan ketidakberesan (*irregularities*). *Errors* merupakan kesalahan yang timbul sebagai akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan lain-lain. Sedangkan *irregularities* merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Dalam istilah sehari-hari kecurangan dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Kecurangan merupakan salah satu bentuk *irregularities*. Secara singkat kecurangan dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu.

Menurut Arens (2006:430) kecurangan merupakan: “Gambaran setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksud untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva.” Sedangkan menurut Soejono Karni (2000) kecurangan manajemen yaitu: Kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelas sosial ekonomi yang terhormat dan biasa disebut *white collar crime*. Kecurangan manajemen dibagi menjadi dua tipe, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakannya. Sedangkan kecurangan korporasi

adalah kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan demi memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut.

2.8. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*)

Deteksi kecurangan (*Fraud Detection*) mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan (*fraud indicators*) yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Ramaraya (2008:4) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi.

Faktor-faktor penyebab tersebut adalah; Karakteristik terjadinya kecurangan; Memahami Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan; Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit dan Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Identifikasi atas faktor-faktor penyebab, menjadi dasar untuk kita memahami kesulitan dan hambatan auditor menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan. Meski demikian faktor-faktor itu tidaklah menjadi alasan untuk menghindarkan upaya pendeteksian kecurangan yang lebih baik. Ferdian, dkk (2006:2) menyatakan bahwa beberapa ahli pengauditan telah mendokumentasikan jenis-jenis kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan yang terjadi di lingkungan audit. Mereka mencoba untuk menghubungkannya dengan peristiwa dan deteksi yang dilakukan. Dalam banyak penelitian, kekeliruan dan kecurangan umum pada laporan keuangan dikodifikasi melalui tujuan audit yang terlanggar atau siklus transaksi yang terkait.

Dalam Standar Auditing (SA) seksi 316 – Pertimbangan atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan – (PSA No. 70) menyebutkan ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas Laporan Keuangan:

- a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti:
 - (a) manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan
 - (b) representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan
 - (c) salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
- b. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kecurangan (*fraud*) perlu dibedakan dengan kekeliruan (*error*). Kekeliruan dapat dideskripsikan sebagai "*unintentional mistakes*" (kesalahan yang tidak disengaja). Kekeliruan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi, dari terjadinya transaksi, pendokumentasian, pencatatan, pengikhtisaran hingga proses menghasilkan laporan keuangan (Herman, 2009).

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal.

Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja (Amrizal, 2004:2).

Secara umum penyebab terjadinya kecurangan diakibatkan oleh faktor faktor internal antara lain adalah:

- 1) Penyembunyian (*concealment*). Kesempatan yang ada tidak terdeteksi oleh pengendalian internal perusahaan, sehingga kesempatan tersembunyi ini diketahui oleh seorang yang kemudian melakukan kecurangan.
- 2) Kesempatan (*opportunity*). Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar dapat mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi dini.
- 3) Motivasi (*motivation*). Pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas demikian, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan/kerakusan dan motivasi lain.
- 4) Daya tarik (*attraction*). Sasaran kecurangan akan direncanakan biasanya jika merupakan sesuatu yang menarik atau menguntungkan pelaku.
- 5) Keberhasiam (*success*). Pelaku perlu menilai peluang berhasil tidaknya suatu tindak kecurangan, yang dapat menghindari penuntutan atau deteksi.

Adapun penyebab terjadinya kecurangan faktor eksternal, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengendalian internal perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas perusahaan yang dianggap sebagai suatu tunjangan karyawan.
- 2) Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang jelek, yaitu kurang adanya saling percaya dan penghargaan yang tidak semestinya. Pelaku dapat menemukan alasan bahwa kecurangan hanya merupakan kewajibannya.
- 3) Balas dendam (*revenge*), yaitu ketidaksukaan yang berlebihan terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut.
- 4) Tantangan (*challenge*), yaitu karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk “merusak sistem”, sehingga mendapatkan kepuasan sesaat atau pembebasan frustrasi.

Fokus Auditor berkaitan dengan pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kecurangan (*fraud*) meperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Eksistensi kesalahan dapat menunjukan pada auditor bahwa catatan akuntansi kliennya tidak dipercaya dan dengan demikian tidak memadai sebagai suatu dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Adanya sejumlah besar kesalahan mengakibatkan auditor dapat menyimpulkan bahwa telah dilakukan pencatatan akuntansi yang tidak benar.
- 2) Apabila auditor ingin mempercayai pengendalian interen, auditor harus memastikan dan menilai pengendalian tersebut dan melakukan pengujian ketaatan (*compliance test*) atas operasi. Apabila pengujian ketaatan menunjukkan sejumlah besar kesalahan, maka auditor tidak dapat mempercayai pengendalian interen kliennya.

- 3) Apabila kesalahan cukup material, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kebenaran (*truth*) dan kewajaran (*fairness*) laporan keuangan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang serupa yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Herman (2009) tentang pengaruh pengalaman dan skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian Noviyanti (2007) menyimpulkan bahwa jika auditor diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan, dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisme profesional auditor.

Fitriany (2012) menyimpulkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi gejala-gejala kecurangan, sedangkan pengalaman audit dan skeptisme profesional terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan auditor mendeteksi gejala-gejala kecurangan.

Matondang (2010), menyatakan bahwa pengalaman, independensi dan keahlian profesional berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Herty (2010), menunjukkan bahwa variabel independensi dan profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*.

Tabel 2
Penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1	Edy Herman (2009)	Pengaruh Pengalaman Dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Pengalaman, skeptisme, pendeteksian kecurangan	Independensi	skeptisme dan pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan
2	Noviyanti (2007)	Skeptisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Sketisme Profesional Auditor, deteksi Kecurangan	Pengalaman dan independensi	skeptisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan dan kepribadian mempengaruhi sikap skeptisme profesional auditor
3	Matondang (2010)	Pengaruh Pengalaman, independensi dan keahlian profesionalisme terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan	Pengalaman, independensi	Skeptisme Profesionalisme, Pendeteksian Kecurangan	pengalaman, independensi dan keahlian profesional berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan
4	Herty (2010)	Pengaruh Independensi Dan Profesional Auditor Internal Dalam Upaya Mencegah Dan	Independensi, Profesional Auditor dan pendeteksian kecurangan	Skeptisme Profesionalisme, Pengalaman	independensi dan profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan dalam upaya

		Mendeteksi Terjadinya <i>Fraud</i>			mencegah dan mendeteksi terjadinya <i>fraud</i> .
5	Fitriany (2012)	Pengaruh, Pengalaman Audit Dan Tipe Kepribadia Terhadap Skeptisme Profesional Dan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	Pengalaman,pendeteksian kecuranga, skeptisme	independensi	pengalaman audit dan skeptisme profesional terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan auditor mendeteksi gejala-gejala kecurangan.

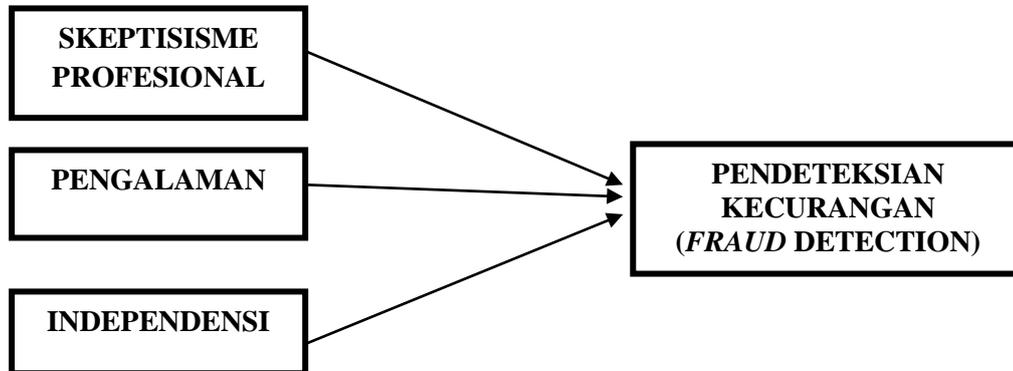
2.10. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme Profesional Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan, untuk dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk menganalisa pengaruh antara variable X (independen) terhadap variabel Y (dependen).

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagian acuan dalam menilai suatu pertanyaan yang layak atau tidak. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yang kemudian dilakukan uji regresi linier berganda yang akan menghasilkan hasil penelitian, maka akan dibuat suatu kesimpulan sebagai hasil analisa.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Pengalaman, Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud detection*) adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Pikir



2.11. Perumusan Hipotesis

1. Skeptisisme Profesional Auditing terhadap Pendeteksian Kecurangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Skeptisisme auditor dalam mendeteksi kecurangan” mengenai skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan, hasilnya menunjukkan bahwa Auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis identifikasi jika diberi penaksiran resiko kecurangan yang tinggi berpengaruh secara signifikan, tipe kepribadian mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian lain oleh Fullerton dan Durtschi (2004) yang menemukan adanya hubungan positif antara skeptisisme profesional dan kemampuan mendeteksi kecurangan.

Skeptisisme dan pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan (Herman, 2009). Auditor yang skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan bukti dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan, tanpa menerapkan skeptisisme profesional auditor, hanya akan menemukan salah saji

yang disebabkan oleh kekeliruan-kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya (Novianti, 2007).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)

2. Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan.

Penelitian Noviyani et.al (2002) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman. Fitriyani (2012) menyatakan bahwa pengalaman dan skeptisme berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal sebagai berikut: a) Mendeteksi kesalahan, b) Memahami kesalahan dan c) Mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian.

Berdasarkan konsep di atas maka peneliti menduga bahwa semakin banyak pengalaman audit yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin meningkatkan skeptisme profesionalnya. Selain itu, auditor yang telah berpengalaman diduga akan semakin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan bila

dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

3. Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud detection*)

Hubungan antara Independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dan kekeliruan Laporan Keuangan adalah ditinjau dari aspek-aspek independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya.

Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor, jadi dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun.

Matondang (2010), menyatakan bahwa pengalaman dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Begitu juga dengan Penelitian Herty (2010) menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi berpengaruh signifikan dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Independensi berpengaruh positif terhadap Pendeteksian kecurangan (*fraud detection*).